

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan penelitian mengenai modal politik tersebut masih terus dilakukan sampai saat ini¹. Adapun menurut Kimberly L Casey, modal politik yaitu, jumlah dari kombinasi jenis lain modal untuk tindakan politik atau pengambilan investasi modal politik yang dikembalikan ke dalam sistem produksi (reinvestasi). Casey melihat ada 7 modal politik² yaitu, modal kelembagaan, modal sosial, modal manusia, modal ekonomi, modal simbolik, modal moral, dan modal budaya.³

Modal politik dapat dikatakan sebagai salah satu bekal kandidat untuk bisa memenangkan suatu kontestasi politik. Seorang kandidat yang mempunyai modal politik yang lebih besar dari kandidat lainnya, juga akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menang dalam suatu kontestasi politik. Kajian mengenai modal politik semakin menarik untuk dikaji lebih jauh karena ia mampu menjelaskan bagaimana pengaruh dukungan yang diberikan oleh

¹ Hasil penelitian, Tawakkal Baharuddin dan Titin Purwaningsih (2017) modalitas calon bupati dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 (studi kasus : Indah Putri Indriani sebagai bupati terpilih di kabupaten luwu utara provinsi sulawesi selatan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mempelajari bagaimana modalitas yang dimiliki oleh para kandidat dalam penyelenggaraan pemilukada, studi pada Indah Putri Indriani sebagai bupati terpilih di kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015. Bahwa penelitian modal Modalitas tersebut adalah modal sosial, budaya, politik dan ekonomi dari tiga modal ini kandidat tersebut mampu bersaing di kontestan politik. Hal ini membuktikan bahwa Indah Putri Indriani sebagai seorang perempuan dan juga pendatang mampu mengakumulasi modal yang dimilikinya.

² Modal politik terbagi tujuh yaitu pertama, modal lembaga adalah kelembagaan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota yang saling mengikat dan adanya perilaku sosial untuk bekerjasama dan mencapai tujuan yang sama. Hubungan terkuat antara pencalonan dan lembaga-lembaga politik adalah partai politik. Kedua, modal sosial dalam hal ini terkait antara jaringan hubungan sebagai sumber daya kedudukan sosial artinya adanya hubungan jaringan seseorang untuk bisa mendapatkan posisi daalam kelompok sosial . Ketiga, modal manusia sumber daya yang ada dalam kepemilikan aktor tersebut misalnya kemampuan intelektual atau kualitas seorang aktor itu sendiri. Keempat, modal ekonomi tidak dapat dipungkiri bahwa setiap usaha termasuk untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pastinya membutuhkan dana atau biaya. Modal ekonomi diukur semata-mata sebagai kebanyakan pribadi mengenai kekayaan atau lebih tepatnya, potensi bahwa seseorang memiliki finansial untuk berkontribusi pada pencalonan mereka sendiri. Kelima, Modal simbolik merupakan sebuah simbol yang dimiliki oleh seseorang dan diketahui oleh orang banyak. Modal simbolik berkaitan erat dengan modal budaya dan dihasilkan sebagai produk dominasi. Keenam, modal budaya Budaya mempengaruhi tingkat pengetahuan yang dapat mempengaruhi ide dan gagasan seseorang. Ketujuh, modal moral merupakan suatu daya tarik yang penting oleh aktor yang ingin menarik hati. (Kimberly L. Casey.2008)

³ Kimberly L Casey.2008. Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu's Interconvertibility Theory. Paper Presented at the Illinois State University Conference for Student of Political Science. University of Missouri-St.Louis, *jurnal*

suatu lembaga politik⁴ dalam hal ini ialah partai politik dan koalisinya terhadap kemenangan seorang kandidat. Sehingga, peneliti dalam hal ini memahami bahwa tanpa dukungan dari suatu lembaga politik⁵ akan sulit bagi seseorang untuk maju ataupun menang dalam suatu pertarungan pemilihan umum legislatif (Pileg), dikarenakan melalui modal politik kelembagaan ini calon kandidat bisa dengan mudah untuk mendapat hati masyarakat dalam pemilihan umum.

Dalam pandangan lain, Bourdieu membagi empat modal; pertama, adalah modal ekonomi yang terdiri dari alat-alat produksi, materi dan uang. Kedua, modal budaya yang dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun keluarga. Ketiga, modal sosial atau jaringan yang dimiliki individu dan keempat yaitu, segala bentuk status, otoritas dan legitimasi yang terakumulasi sebagai bentuk modal simbolik.⁶ Dalam hal ini, modal sosial menjadi modal yang cukup menarik untuk peneliti lihat dan tinjau lebih jauh. Bourdieu mendefinisikan bahwa modal sosial aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk bentuk *social capital* (modal sosial).⁷

Selanjutnya, jika mengacu kepada Robert Putnam, mendefinisikan bahwa modal sosial sebagai suatu nilai *mutual trust* (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial merupakan institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.⁸

⁴ Lembaga politik suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang menyangkut kepentingan masyarakat pada umumnya agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, seperti misalnya pemerintah, mencakup aparatur politik teknis untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Bacaan lebih lanjut pada buku dasar-dasar ilmu politik (Miriam Budiarjo).

⁵ Dalam penelitian ini yang dikatakan lembaga politik ialah partai politik dan koalisi pendukung kandidat dalam suatu kontestasi politik. Artinya, dengan memiliki kelembagaan partai pendukung yang solid akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemenangan seorang kandidat

⁶ Abd. Halim, Politik Lokal; Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya (Yogyakarta: Lp2b, 2014), 108

⁷ Ibid Hlm 109

⁸ Robert putnam, Konversi Modal Sosial Menuju Modal Politik, *Jurnal Tentang Sebuah Gerakan Converting Sosial Capital Into Political Capital*, Hlm 1

Lebih lanjut, modal sosial juga didefinisikan sebagai adanya jaringan untuk penentuan kedudukan sosial. Latar belakang sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya).⁹ Artinya dalam penelitian ini, peneliti melihat latar belakang sosial seorang kandidat dalam menentukan kedudukannya ialah semakin tinggi dan bagus tingkat pendidikan seorang kandidat maka semakin tinggi kedudukannya ditengah masyarakat. Begitu juga halnya dengan pekerjaan awal kandidat, semakin bagus status pekerjaan awal yang dimiliki seorang kandidat maka semakin tinggi kedudukannya ditengah masyarakat. Sementara untuk ketokohan sendiri seorang kandidat akan dilihat apakah ia seorang tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya.

Dalam pileg DPR-RI Sumatra Barat (sumbar) wilayah Dapil II terjadi persaingan yang sengit antar caleg dimana para caleg tersebut membentuk modal dan strateginya masing-masing untuk dapat memenangkan kontestasi politik. Menariknya lagi kebanyakan caleg yang bersaing di Sumbar ini ialah istrinya para kepala daerah, tentu dalam persaingan politik sudah sangat matang karena suaminya sudah dahulu mempunyai modal dan strateginya. Lebih lanjut di wilayah Dapil II caleg dari partai keadilan sejahtera (PKS) yakni Nevi Zuairina yang ikut bersaing dalam pileg DPR-RI Sumbar. Dalam hal ini Nevi Zuairina tidak mempunyai pengalaman sama sekali tentang persaingan politik di karena kan Nevi baru pertama kali mencalon menjadi caleg DPR-RI tersebut artinya dengan statusnya yang seorang istrinya Gubernur Sumbar Nevi sudah mempunyai modal yang matang untuk bersaing di kontestan politik.

Jadi antara modal sosial dan modal politik sangat membantu untuk membuka peluang memenangkan kontestan politik.¹⁰ Modal sosial yang kuat banyak membantu kinerja- kinerja politik yakni mengikat isu-isu yang hak dari masyarakat. Berbagai kinerja politik dilakukan oleh masyarakat lokal untuk mendukung kegiatan- kegiatan politik seperti memobilisasi suara pemilih, partisipasi langsung dalam proses legilasi, demonstrasi, lobi, serta membangun wacana sebagai modal politik untuk menuju demokrasi. Artinya dapat dilihat bahwa modal sosial

⁹ Maria Stella Ignasia Pantouw, *Modalitas Dalam Kontestasi Politik (Studi Tentang Modalitas Dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh Dan Maximiliaan Lomban Pada Pemilukada Di Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010)*. Universitas Diponegoro, 2012

¹⁰ Ibid hlm 2

memiliki implikasi langsung terhadap lahirnya modal politik. Lebih lanjut, peneliti memahami bahwa modal sosial membentuk realitas modal politik secara tidak langsung, dimana seseorang yang memiliki modal sosial secara tidak langsung telah memiliki modal politik dan modal politik seseorang terdiri dari seberapa kuat ia menguasai modal sosial (*sosial capital*).

Peneliti mencoba mengelompokkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan modal politik, akan tetapi memiliki fokus kajian masing-masing seperti penelitian (Kurniawati Hastuti Dewi dan dkk) dalam *jurnal Penelitian Politik* dengan judul **(Modal, Strategi Dan Jaringan Perempuan Politisi Dalam Kandidat Pilkada Langsung)**, jurnal ini menggaris bawahi pentingnya tiga hal yaitu modal berupa modal individu dan modal sosial, strategi, dan jaringan yang harus dimiliki dan mampu dimainkan oleh perempuan politisi untuk dapat dicalonkan dalam Pilkada langsung. Selanjutnya (Indah Adi Putri) *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Desember, Jaringan Keekerabatan Matrilineal Sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg Dalam Pemilu 2014. Peneliti ini berfokus kepada bagaimana jaringan keekerabatan matrilineal yang digunakan sebagai modal sosial oleh perempuan caleg dalam Pemilu 2014.

Hasil dari penelitian Kurniawati Hastuti Dewi dan dkk dalam *jurnal Penelitian Politik*. Peneliti menjelaskan bahwa modal dan strategi yang dimiliki masing-masing kandidat yang menang dengan sangat jelas dan menyeluruh. Modal dan strategi kandidat yang dijelaskan sesuai dengan teori yang digunakan. Peneliti juga mampu menjabarkan aktor-aktor politik yang membantu kandidat pada pemilihan. Hasil penelitian dari Selanjutnya Indah Adi Putri *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Diketahui bahwa di Minang kabau yang menganut sistem keekerabatan matrilineal, terdapat *nikin mamak* dan *bundo kanduang* yang berperan besar dalam kaum. Hal ini menjadi modal sosial yang dapat digunakan oleh caleg perempuan sebagai strategi untuk mendapatkan dan meraih dukungan suara.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti yaitu, (1) pada aspek modal kelembagaan yang dimanfaatkan oleh aktor itu sendiri bahwa dengan adanya modal kelembagaan seorang kandidat ini bisa mendapatkan peluang yang besar untuk memenangkan kontestasi dalam politik. Peneliti berasumsi bahwasanya seorang aktor dapat memenangkan kontestasi politik dengan menggunakan modal kelembagaan yang dimanfaatkan oleh seorang individu, untuk dapat memobilisasi suara pemilih dalam pemilihan legislatif. Ditengah-tengah persaingan politik yang semakin kompetitif, kehadiran modal kelembagaan menjadi sangat penting. Dalam hal ini, pihak yang memiliki modal kelembagaan relatif besar

dibandingkan dengan pesaingnya akan diuntungkan. Begitu juga sebaliknya, pihak yang memiliki modal kelembagaan jauh lebih kecil akan kesulitan untuk bisa bersaing apalagi memenangkan kompetisi politik. (2) perbedaan yang kedua yaitu, fokus pada penelitian ini adalah bagaimana kemudian modal sosial yang dimiliki seseorang menjadi sangat berpengaruh dalam memenangkan kontestasi politik. Modal sosial berupa jaringan yang dimiliki oleh individu dengan latar belakang yang membuat ia memiliki kedudukan sosial yang tinggi ditengah masyarakat kemudian dimanfaatkan menjadi faktor signifikan bagi kandidat dalam memenangkan suatu kontestasi politik.

Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Pemilu serentak akan mempengaruhi komitmen penguatan partai politik dalam koalisi permanen untuk memperkuat basis kekuatan mereka di lembaga-lembaga negara yang tinggi sehingga dengan pemilu serentak diharapkan bisa memfasilitasi pembenahan Sistem Presidensial di Indonesia.¹¹ Artinya, ada upaya penguatan peran dan fungsi partai politik atau koalisi dalam setiap pemilihan umum di Indonesia.

Namun, disisi lainnya peneliti melihat sistem Pemilihan Umum dilakukan secara langsung. Artinya pemilih tidak lagi hanya memilih partai politik pilihan mereka pada pemilihan umum, melainkan dapat langsung menentukan calon pilihan mereka. Baik calon untuk legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota) maupun calon untuk eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota/Bupati dan Wakil Bupati). Semakin disadari bahwa wajah demokrasi di Indonesia dipenuhi oleh semangat dan gairah persaingan. Besarnya jumlah partai politik, sistem perhitungan berdasarkan suara terbanyak, pemilukada (Gubernur dan walikota/Bupati), dan pemilihan presiden secara langsung semakin menegaskan era persaingan terbuka dalam demokrasi di Indonesia. fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relatif kecil sehingga kandidat yang ingin

¹¹ jurnal ilmiah ilmu pemerintah, vol.3, no.1, 2018, 73-88 doi: 10.14710/jip.v3i1.3234, departemen ilmu politik, fisip, unpad, jawa barat, hlm.1

memenangkan pemilukada harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik karena kompetisi lebih menonjol terhadap pengaruh figur kandidat. Untuk itu para kandidat mempunyai strategi untuk bisa memenangkan kontestan politik, semakin banyaknya modal seorang maka peluang untuk menang semakin besar.

1.2. Rumusan Masalah

Pileg merupakan proses demokrasi secara prosedural dan substansial dengan cara memilih orang/figur dan kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Dalam demokrasi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan sebagai kepala daerah dengan diberi kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut kompetisi dalam penempatan jabatan-jabatan publik yang dipilih, tetapi di dalam tataran empiris, kesempatan itu sebenarnya berbeda antara satu dengan orang lain karena modal yang dimiliki setiap orang dalam kontestasi pemilukada secara langsung pada kenyataannya berbeda-beda¹²

Latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya menarik peneliti untuk menelusik beberapa data yang kemudian membantu peneliti untuk merumuskan permasalahan, diantara beberapa berita (Harian Haluan News),¹³ Seperti yang terjadi di lapangan bahwa caleg tersebut menggunakan jabatannya sebagai ketua Dharma Wanita Provinsi Sumatera Barat itu hadir di sekolah tersebut pada 31 Januari 2019. Nevi Zuairina merupakan istri dari Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno¹⁴ itu dilaporkan membagi-bagikan bahan kampanye dalam bentuk kartu nama, dengan modal yang digunakan oleh Nevi Zuairina untuk bisa

¹² Tawakkal Baharuddin dan Titin Purwaningsih (2017) Modalitas calon bupati dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 (studi kasus : Indah Putri Indriani sebagai bupati terpilih di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, hlm 221

¹³ <https://www.harianhaluan.com/news/detail/71495/dugaan-kampanye-di-luar-jadwal-nevi-zuairina-dipanggil-bawaslu-24-september-2019>

¹⁴ Irwan Prayitno merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia 2 periode (2004–2009 dan 2009-2014) dari Partai Keadilan Sejahtera dengan daerah pemilihan Sumatera Barat I. Pada Tanggal 15 Agustus 2010, Beliau dilantik menjadi Gubernur Sumatera Barat periode 2010-2015 oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi di Gedung Darurat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pria kelahiran Jogjakarta ini sempat menjadi kontroversi pada bursa pencalonan Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2005 karena dia disinyalir bukan berasal dari Minangkabau, disebabkan nama belakangnya serta tempat kelahirannya. Namun kemudian isu tersebut diluruskan dengan menyebutkan bahwa ibunya, Dra. Hj. Sudarni Sayuti (Alm), berasal dari Kuranji, Padang dan ayahnya, Drs. H. Djamrul Djamal, SH, dari Simabur, Tanah Datar. Ia bahkan memperoleh Gelar Kebesaran dari Suku Tanjung, kecamatan Pauh, kota Padang, Datuak Rajo Bandaro Basa

mengkampanyekan atau memperkenalkan dirinya secara tidak langsung kepada masyarakat, Hal ini mendapatkan keuntungan bagi Nevi Zuairina untuk meraih beberapa suara dari sekolah tersebut. Sepertinya kandidat tersebut mempunyai jabatan di kelembagaan. Melihat modal kelembagaan dari Nevi Zuairina ini ada 9 yaitu¹⁵, (1). Ketua Tim pergerakan PKK Provinsi Sumatra Barat (2). Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumbar (3). Ketua Dekranasda Provinsi Sumatra Barat (4). Ketua Forum PAUD Provinsi Sumatra Barat (5). Ketua P2TP2A Provinsi Sumatra Barat (6). Ketua FORIKAN Provinsi Sumatra Barat (7). Ketua Forum Silaturahmi Majelis Ta'lim Provinsi Sumatra Barat (8). Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Provinsi Sumatra Barat (9). Ketua Persatuan Istri Pemprov dan Muspida Provinsi Sumbar.

Dari penjelasan tersebut terdapat 9 bentuk modal kelembagaan Nevi Zuairina. Seorang caleg dapat menggunakan modal kelembagaan yang dimilikinya sebagai alat untuk mesosialisasikan dirinya sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) Dapil II Sumbar. Selain itu, Nevi Zuairina yang merupakan caleg perempuan pendatang baru, mampu mengalahkan Caleg petahana Dapil II Sumatera Barat, petahana tersebut kalah dalam bersaing walaupun sudah memiliki banyak pengalaman didunia politik dan juga sudah memiliki basis masa suara pada Pemilu legislatif (pileg) sebelumnya, tetapi Nevi Zuairina mampu mengungguli perolehan suara para petahana. Petahana yang dikalahkan oleh Nevi adalah Hj Refrizal¹⁶ (PKS) dan Agus Susanto S.H M.H¹⁷ (PDIP), seperti yang di beritakan media online Kabar Sumbar.

“Sejumlah petahana Anggota DPR RI asal Sumatera Barat tumbang, alias tak lagi duduk di kursi Senayan. Ada yang kalah saing dengan Caleg satu Partainya, dan ada juga Partainya yang tak lagi lolos menuju Senayan. Jika mengacu pada data hasil rekapitulasi suara komisi

¹⁵ Irwan-prayitno.com/2015/05/nevi-zuairina-menjadi-ibu-dan-istri-profesional 15 mei 2015

¹⁶ HJ Refrizal terpilih sebagai anggota DPR, RI dapil II Sumatra Barat ia lahir di di Padang, 20 Agustus 1959, Hj Refeizal menikah dengan Andam Dewi dan dikaruniai 7 orang anak pada masa kerja tahun 2004 ia mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2004-2009. Refrizal terpilih kembali menjadi anggota DPR-RI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2009 dan 2014. Di Pileg 2014, ia memperoleh 25,568 suara dan menduduki jabatan di Komisi VI DPR-RI yang membidangi Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha. Pada April 2016, Refrizal dipindahkan ke Komisi XI DPR-RI dengan ruang lingkup di bidang Keuangan dan Perbankan. Lihat lebih lanjut pada (Kumparan).

¹⁷ Agus Susanto S.H M.H lahir di Ujung Gading, Lembah Melintang, Pasaman Barat, Sumatra Barat, 10 Agustus 1971, Ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dari PDI Perjuangan melalui daerah pemilihan (dapil) Sumatra Barat II. Baca lebih lanjut (Jejak parlemen.id)

pemilihan umum (KPU) Sumatera Barat, Sabtu 11 Mei 2019 lalu, setidaknya ada 4 petahana yang harus merelakan kursi empuk Senayannya¹⁸

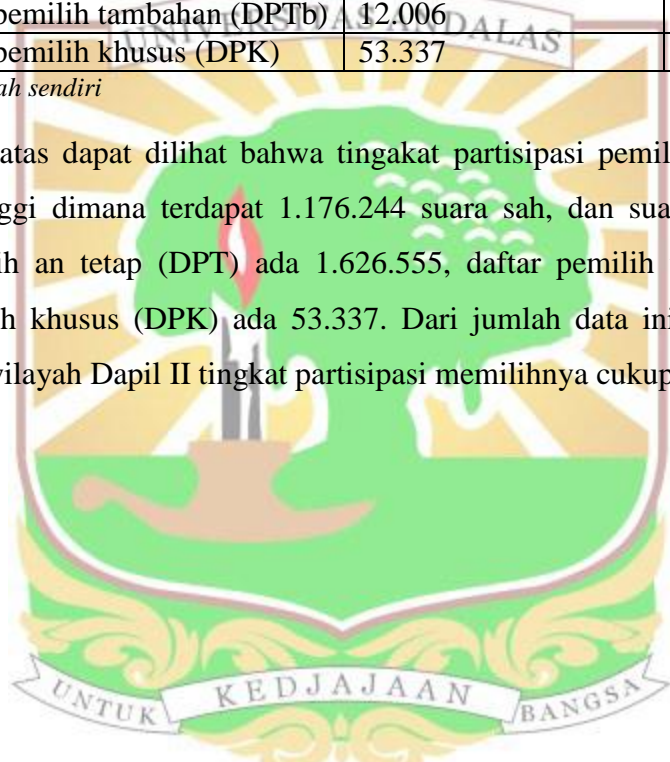
Tabel 1.1

Rekapitulasi Nasional DPR-RI Sumatra Barat Dapil II

NO	Ringkasan	Jumlah	%
1	Jumlah Seluruh suarah sah DPR –RI	1.176.244	92,94%
2	Jumlah Suara Tidak sah	89.299	7,06%
3	PARTISIPASI PEMILIH	1265.543	77,81%
4	Jumlah pemilih	1.692.778	
	a. Daftar pemilih tetap (DPT)	1.626.555	
	b. Daftar pemilih tambahan (DPTb)	12.006	
	c. Daftar pemilih khusus (DPK)	53.337	

Sumber data skunder diolah sendiri

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilihan DPRI-Ri wilayah Sumbar II cukup tinggi dimana terdapat 1.176.244 suara sah, dan suara yang tidak sah ada 89.299, daftar pemilih an tetap (DPT) ada 1.626.555, daftar pemilih tambahan (DPTb) ada 12.006, daftar pemilih khusus (DPK) ada 53.337. Dari jumlah data ini dapat dilihat bahawa masyarakat Sumbar wilayah Dapil II tingkat partisipasi memilihnya cukup tinggi.



Tabel 1.2

Persentase Jumlah Suara Caleg Yang Menang Pada Dapil II Sumbar

No	Nama	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Suara partai
1	Ade Rezki Pratama	Gerindra	104.740	223.891

¹⁸ Empat Petahana DPR RI dari Sumbar yang Tak Lagi Lolos, <https://www.kabarsumbar.com/berita/empat-petahana-dpr-ri-dari-sumbar-yang-tak-lagi-lolos/>. Dilihat pada tanggal 24 September 2019

2	Nevi Zuairina	PKS	52.141	199.737
3	Mulyadi	Demokrat	144.954	197.737
4	Guspardi Gaus	PAN	56.365	151.476
5	John kenedy Aziz	Golkar	43.540	79.023
6	Muhammad Iqbal	PPP	28.949	78.378

Sumber data skunder : <https://www.kabarsumbar.com/berita/ini-komposisi-14-caleg-dpr-ri-terpilih-dari-sumbar/tahun-2019>

Pada pemilu legislatif Tahun 2019 kursi yang diperebutkan oleh para Caleg di Dapil II Sumatera Barat sama dari tahun sebelumnya yaitu hanya 6 kursi. Pada Pileg kali ini 6 partai politik berhasil meloloskan calon anggota legislatifnya, partai tersebut adalah PAN, Demokrat, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra. Caleg petahana yang kembali mencalonkan dirinya pada pemilu tahun 2019 namun kalah dalam pemilu yaitu Hj Refrizal dan Agus Susanto S.H M.H. Wajah pendaang baru yang berhasil memenangkan kursi Dapil II yaitu, Nevi Zuairina dan Guspardi Gaus

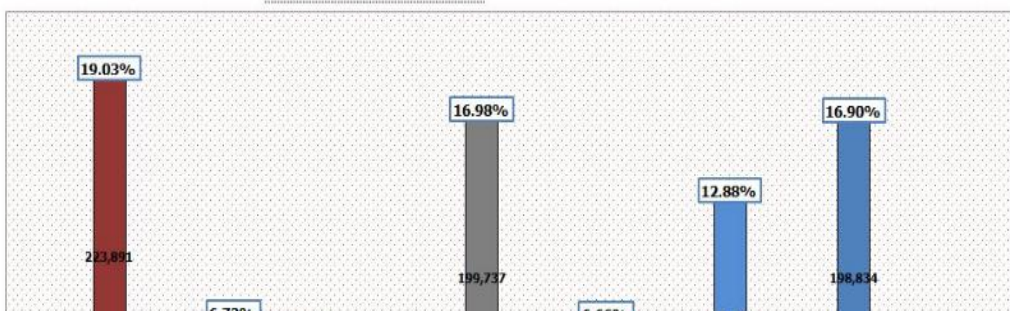


Tabel 1.3

**GRAFIK PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
CALON ANGGOTA DPR RI PEMILU TAHUN 2019
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

DPR RI SUMBAR II

PROVINSI : SUMATERA BARAT
DAERAH PEMILIHAN : SUMATERA BARAT II



Sumber data dari web.kpu.co.id

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan posisi dua suara terbanyak dari semua partai politik di wilayah Sumbar dapil II. Dapat dilihat bahwa elektabilitas partai politik PKS tinggi dikalangan masyarakat, ini membuktikan bahwa caleg tersebut memiliki modal politik yang baik.

Masing-masing calon legislatif memiliki modal yang berbeda, modal yang dimiliki calon legislatif tersebut, itulah cara menarik perhatian rakyat. Selain itu, calon legislatif yang maju pada pileg 2019 ini merupakan calon-calon yang telah berpengalaman di dunia politik. Tetapi pilihan dan penilaian masyarakat tidak hanya dari pengalaman di dunia politik, tetapi masyarakat lebih memilih wajah baru yang memiliki modalnya sendiri untuk menarik hati masyarakat. Nevi Zuairina¹⁹ mengalahkan 2 petahana yang mencalon di dapil Sumbar II yang sudah berpengalaman di area kontestasi politik sebelumnya yaitu, Agus Susanto dan Refrizal bersaing dengan orang yang asli daerah atau bisa dikatakan putra daerah. Namun dengan modal Nevi yang sering bersilahturahmi dengan masyarakat sekitar secara tidak langsung membuat elektabilitas Nevi naik di ruang publik. Ia bisa menunjukkan bahwa ia mampu mengambil hati masyarakat.

¹⁹ Terpilihnya Nevi Zuairina seorang caleg perempuan yang belum memiliki pengalaman di bidang politik berbeda dengan pesaingnya yang sudah berpengalaman di bidang politik, Nevi layak disebut rising star Pemilu 2019 di Sumbar, Nevi diuntungkan karena istri dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, tapi Nevi Zuairina melewati perjuangan ketat dan melelehkan antar Caleg satu Parpol. maupun dengan Caleg Parpol lain, Nevi lahir di kota Jakarta, 20 Desember 1965, Nevi bergabung di partai PKS, Nevi Zuairina di nomor Caleg PKS di nomor dua, semua orang tahu kalau nomor urut tidak nomor satu di PKS maka itu bukan pilihan prioritas kader Lalu Nevi raih suaranya mencapai 52 ribu lebih, itu diraih di Dapil Sumbar dua yang bukan kampung halaman Nevi. Suara segitu diraih pendatang baru dan meninggalkan suara incumbent maupun Caleg pilihan prioritas kader. Nevi Zuairina mengaku hubungan baik dan rajin bersilahturahmi dengan masyarakat menjadi modal buat maju di Dapil Sumbar 2

Selanjutnya, melihat pada baliho kampanye yang disebar oleh tim sukses pemenangan Nevi ada nama suaminya yaitu, Irwan Prayitno untuk dicantumkan di baliho. Artinya salah satu modal yang digunakan oleh Nevi ini untuk menarik keuntungan dari pendukung suaminya, serta suaminya berperan penting karena sewaktu berkampanye Nevi didampingi terus oleh suaminya, bahkan membantu Nevi untuk mendapatkan suara pada basis suara pemenangan suaminya Nevi, ketika memenangkan pemilihan Gubernur sebelumnya. Lebih lanjut Nevi Zuairina mempunyai strategi perencanaan yang matang karena dengan melampirkan nama suaminya di baliho tersebut sudah membuat masyarakat terpengaruhi, karena dengan sosok suaminya Gubernur Sumbar.



Gambar 1.1
Foto Nevi Zuairina berkampanye



Sumber data skunder facebook Nevi zuaraina 2019

Dalam hal ini, pihak yang memiliki modal politik relatif besar dibandingkan dengan pesaingnya akan diuntungkan. Begitu juga sebaliknya, pihak yang memiliki modal politik jauh lebih kecil akan kesulitan untuk bisa bersaing apalagi memenangkan kompetisi politik.

Menurut Asrinaldi, terkait banyaknya Caleg perempuan yang lolos pada pemilu 2019 memiliki hubungan dengan kekerabatan dengan kepala daerah di Sumatera Barat sangat memiliki keuntungan. Seperti yang diberitakan pada berita online Kompas.

Pengamat politik Universitas Andalas Dr Asrinaldi mengatakan, lolosnya sejumlah istri kepala daerah di Sumbar merupakan fenomena politik yang menarik. Menurutnya, para istri kepala daerah itu bukanlah kader partai dari bawah, namun hanya ditarik menjadi calon legislatif. Mereka ditarik jadi caleg karena kepopuleran dari suaminya yang menjadi kepala daerah. Artinya, mereka menumpang kepopuleran suaminya," ujarnya²⁰

Dari data-data yang sudah peneliti jabarkan diatas, bahwasannya Nevi Zuairina tidak hanya memiliki modal politik sebagai seorang istri Gubernur Sumatera barat, tetapi Nevi Zuairina juga dikenal oleh masyarakat sebagai perempuan yang aktif, cerdas dan dekat dengan masyarakat. Walaupun tanpa pengalaman politik, Nevi Zuairina dapat membuktikan bahwa Nevi bisa lolos ke senayan dengan perolehan jumlah suara 52.141 ribu suara sah. pada penelitian ini peneliti memiliki asumsi bahwa ada dua modal politik yang menjadi faktor utama dalam kemenangan Nevi Zuairina pada pemilu legislatif tahun 2019 ialah modal kelembagaan serta modal sosial. Adanya beberapa lembaga yang diketui oleh Nevi Zuairina serta status sosial sebagai istri Gubernur Sumatra Barat, yang telah dua periode memimpin di Sumatra Barat adalah kunci utama serta modal utama yang paling berperan dalam memenangkan Nevi Zuairina pada pemilihan umum legislatif tahun 2019.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut menarik peneliti untuk menjadikan ini sebagai kajian penelitian. Permasalahan yang atas kemudian dirumuskan dalam pertanyaan penelitian yaitu : Modal apa yang dimiliki Nevi Zuairina dan bagaimana strategi penggunaan modal tersebut dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan modal Nevi Zuairina pada pemilihan umum legislatif tahun 2019.
2. Untuk menganalisis strategi pemanfaatan modal Nevi Zuairina dalam pemilihan umum legislatif 2019.

²⁰ 3Istri Kepala Daerah Di Sumbar Melenggang Ke Senayan, <https://kilasdaerah.kompas.com/jawa-tengah/read/2019/05/13/12050771/3-istri-kepala-daerah-di-sumatera-barat-melenggang-ke-senayan>. Dilihat pada tanggal 24 september 2019

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

- a) Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan konsep modal politik dan modal sosial sebagai upaya dalam menggali dukungan politik dalam kontestasi Pemilihan umum legislatif.
- b) Menjadi bahan lanjutan bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami masalah-masalah yang berkaitan dengan modal politik dan modal sosial dalam tataran electoral proses.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dilakukan diharapkan dapat menjadi wawasan baru yang baik bagi mahasiswa tentang Modalitas politik dalam tataran kehidupan mahasiswa, terutama dalam pembahasan modal politik dan modal sosial diarena pemilihan umum legislatif.



